

**STRATEGI *FAITH BASED DIPLOMACY* PENGURUS CABANG  
ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA (PCINU) SUDAN DALAM  
MENYEBARLUASKAN NILAI ISLAM NUSANTARA 2020-2021**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ABDURRAZZAQ DZAKY W**

19323015

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**STRATEGI *FAITH BASED DIPLOMACY* PENGURUS CABANG  
ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA (PCINU) SUDAN DALAM  
MENYEBARLUASKAN NILAI ISLAM NUSANTARA 2020-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ABDURRAZZAQ DZAKY W**

19323015

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STRATEGI FAITH BASED DIPLOMACY PENGURUS CABANG ISTIMEWA**  
**NAHDLATUL ULAMA (PCINU) SUDAN DALAM MENYEBARLUASKAN NILAI**  
**ISLAM NUSANTARA 2020-2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

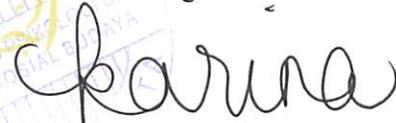
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**28 Agustus 2023**

Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrazzaq Dzaky Winarko  
No. Mahasiswa : 19323015  
Dosen pembimbing : Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : STRATEGI *FAITH BASED DIPLOMACY* PENGURUS CABANG  
ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA (PCINU) SUDAN DALAM  
MENYEBARLUASKAN NILAI ISLAM NUSANTARA 2020-2021.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023



---

Abdurrazzaq Dzaky W

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	18
1.8.4 Proses Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan	19
Dalam sistematika penelitian ini akan menjelaskan dalam 5 Bab bagian, penjelasan atas hal tersebut yaitu :	19
<b>BAB 2</b>	21
2.1. Gambaran Umum dan Kondisi Masyarakat di Sudan	21
2.1.1 Konsep Islam Nusantara	25
2.2. Sejarah dan Kondisi PCINU di Sudan	27
<b>BAB 3</b>	33
3.1. Visi Baru yang dibawa Nahdlatul Ulama sebagai Aktor Faith Based Diplomacy di Negeri Sudan	33
3.2 Nilai Islam Nusantara dalam rangkaian Program Kerja PCINU Sudan	39
3.2.1 Harlah NU ke-95	39
3.2.2 Diskusi Pendidikan Aswaja bersama 15 Negara	40
3.2.3 Seminar Internasional PCINU Sudan bersama Majma Fiqh Al Islami Sudan	40
3.2.4 Bakti Sosial di pelosok Negeri Sudan	41

<b>BAB 4</b>	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Rekomendasi	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	46

## DAFTAR SINGKATAN

NU	: Nahdlatul Ulama
PCINU	: Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
ASWAJA	: Ahlussunnah Wal Jamaah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKU	: Partai Kebangkitan Ummat
PNU	: Partai Nahdlatul Ummat
ICIS	: Internasional Cendekiawan Islam
NGO	: Non Governmental Organization
SLM	: Sudan Liberation Movement
JEM	: Justice and Equality Movement
SPLM-N	: Sudan People's Liberation Movement-North
HIPC	: Heavily Indebted Poor Countries
PPI	: Persatuan Pelajar Indonesia
PP	: Pondok Pesantren
IUA	: International University of Africa
LAKPESDAM	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nahdlatul Ulama melalui gagasan-gagasannya yang fenomenal sudah tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya di tingkat Internasional. Dari sekian banyaknya gagasan yang ditawarkan NU kepada dunia, gagasan besar yang ditawarkan NU adalah berkonsep Islam Nusantara dan Islam Moderat. Kedua nilai itu berisi wacana tentang *tawasuth*, *tasammuh*, *tawazzun*, *i'tidal*, dan *tasyawur*. Wacana itulah yang menjadi bekal utama NU dalam urusan berdiplomasi dan melakukan rekonsiliasi di negara-negara Timur Tengah, dan negara asing lainnya. Wujud usaha NU dalam wacana tersebut tidak hanya sebatas untuk memperkenalkan nilai Islam Nusantara, melainkan itu juga menjadi bentuk *soft-diplomacy* yang menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Awal mula negara Sudan bukanlah negara yang berbasis agama Islam, banyak wilayah di Sudan yang diduduki oleh kerajaan Kristen dan banyak kerajaan Pagan. Saat itu Mesir dikuasai oleh mayoritas bangsa arab muslim yang dipimpin oleh Gubernur Amr bin Ash, saat itu juga Sudan diserang oleh pasukan dibawah pimpinan Amr bin Ash disebabkan karena bangsa Nubia saat itu mencoba mengambil alih wilayah selatan Mesir dari kekuasaan Islam, namun bangsa Nubia mengalami kekalahan sehingga akibat kekalahan tersebut muncullah suatu perjanjian yang menerangkan bahwa selama 6 abad lamanya bangsa Nubia harus berada dibawah kekuasaan Mesir (Thohir 2009).

Setelah hampir 12 abad lamanya berlalu nyatanya bangsa Nubia masih banyak yang beragama Kristen. Bisa dikatakan proses islamisasi bangsa Nubia terbilang sangat lambat. Sampai di abad ke-15 berdirilah kerajaan islam pertama yang bernama Funj, bangsa Nubia dan kerajaan Kristen sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah banyak perpecahan didalamnya yang akhirnya memberi kesempatan bagi kerajaan Islam untuk lahir disana. Latar belakang terbentuknya Nahdlatul Ulama salah satunya dipengaruhi oleh pembaruan ajaran agama oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab di daerah Hijaz. Bertepatan dengan hal tersebut K.H Abdul Wahab Chasbullah memiliki pemikiran jika mempertahankan ajaran *ahlussunnah wal jamaah* (aswaja) menjadi suatu keniscayaan. Sebab ajaran tersebut bersumber langsung dari al-Qur'an, sunnah, ijma' serta qiyas. Sementara itu juga karena NU lahir dari tiga pondasi yaitu semangat nasionalisme, meneruskan perjuangan walisango dalam menyebarkan Agama Islam di Nusantara, dan yang paling utama adalah mempertahankan paham aswaja yang diamalkan oleh rasulullah, sahabat, maupun pengikut nabi (NK 2020).

Nahdlatul Ulama di Sudan tumbuh dan berkembang melalui hadirnya PCINU Sudan yang berdiri pada tanggal 1 Muharram 1420 H atau bertepatan dengan 6 April 2000 M. Pendirian saat itu dilakukan di Masjid Agung Khartoum Sudan dengan keputusan dari Bapak Dr. H. Ahmad Sayuti Anshori Nasution, MA sebagai Rais Syuriah dan Bapak H. Muhammad Sangid, MA sebagai ketua Tanfidziyah PCINU Sudan periode 2000-2001 M. Selanjutnya pada 23 Januari 2002 M, Nahdlatul Ulama Khartoum Sudan diresmikan sebagai "PCINU SUDAN" di Wisma Duta Besar RI Khartoum Sudan untuk waktu yang tak terbatas melalui surat keputusan PBNU, yang menjabat menjadi Ketua Umum PBNU saat itu KH.

Ahmad Hasyim Muzadi. Selanjutnya beberapa perwakilan pengurus PBNU melakukan kunjungan ke Sudan untuk peresmian berdirinya PCINU Sudan yang prosesi itu disaksikan langsung oleh Prof. Dr. KH. Said Agil Munawar, MA (Katib 'Aam PBNU yang juga menjabat sebagai menteri agama pada saat itu).

Kemudian pada 23 September 2007 M yang semula NU Khartoum Sudan akhirnya diresmikan menjadi PCINU Sudan serta mendapat pengakuan resmi dan terdaftar di bawah perlindungan dibawah Kementerian Irsyad dan Wakaf Sudan. Kepemimpinan PCINU Sudan saat itu sebagai Rais Syuriah nya Bapak H. Muhammad Amiruddin, MA dan sebagai ketua Tanfidziyahnya Bapak H. Mirwan Akhmad Taufiq, BA. Kebutuhan dari berdirinya PCINU Sudan tidak lepas dari kebutuhan untuk terus belajar khususnya dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan berdakwah, meskipun dalam prosesnya tidak akan mudah karena banyak tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Bahkan saat itu ada kelompok yang menginginkan agar NU tidak berdiri di Sudan, akan tetapi berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT PCINU Sudan bisa berdiri dan eksis hingga saat ini (SUDAN 2020).

Secara historis pendiri organisasi gerakan Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari isyarat sang guru yaitu K.H Cholil Bangkalan yang kala itu memberikan tongkat dan tasbih kepada K.H. Muhammad Hasyim Asyari. Melalui dua benda tersebut K.H Muhammad Hasyim Asy'ari diperintahkan untuk mendirikan sebuah *jam'iyah*/organisasi kebangkitan yang menjadi wadah bagi para ulama dengan madzhab *tawasuth*. Akhirnya pada 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H melalui shalat istikhoroh, K.H Muhammad Hasyim Asy'ari (w. 1947) dan K.H Abdul Wahab Chasbullah (w. 1971) mendirikan Nahdlatul Ulama yang

memiliki arti “Kebangkitan Ulama”. K.H Muhammad Hasyim Asy’ari menjadi *rais akbar* saat itu dikarenakan ia merupakan sosok ulama yang alim, dan berfikir moderat (Zulfikri, Ahmad, and Ashif Az Zafi. n.d. 2019).

Kalangan tokoh keagamaan yang berasal dari pesantren cukup baik dalam merespon adanya gerakan kebangkitan, hal tersebut terlihat dari berdirinya organisasi pergerakan nasional diantaranya seperti: Nahdlatul Wathan (1916 M), Kemudian Nahdlatul Tujjar (1918 M), serta di tahun yang sama sebuah kelompok diskusi kaum muslim yaitu Taswirul Afkar terbentuk. Organisasi- organisasi tersebut menjadi pondasi berdirinya organisasi gerakan kebangkitan yang mewadahi para alim ulama yang kita kenal sekarang ini dengan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh *Hadzratussyaiikh* K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari bersama dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Nahdlatul Ulama dijadikan induk dari beberapa organisasi yang lebih dahulu terbentuk sebab tujuannya adalah agar organisasi-organisasi sebelum dan sesudahnya memiliki karakteristik yang dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan dan perubahan zaman. Nahdlatul Ulama juga memiliki peran dalam membentuk moral dan kebiasaan masyarakat Indonesia dan diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan kebangkitan khususnya umat Islam dan umumnya seluruh manusia yang ada di muka bumi.

Kiai maupun ulama sebagai garda depan dari organisasi Nahdlatul Ulama tentu memiliki peran penting dalam menciptakan ruang kuasa sosial politik dalam kehidupan masyarakat. Kiai merupakan pewaris nabi yang memiliki kemampuan dalam membina dan menata kehidupan masyarakat, sementara ulama adalah seseorang yang memiliki kepentingan dalam pengembangan syiar keagamaan dan dakwah. Kiai dinilai lebih dekat dengan masyarakat sebab mengemban amanah

serta tanggung jawab keagamaan yang relatif lebih kompleks daripada ulama sehingga kiai memiliki posisi penting dalam relasi sosio-kultural umat Islam di Indonesia. Kiai adalah aktor politik dengan sumber daya kharismatik dan tradisional sehingga dapat membentuk preferensi sosial dalam struktur sosial masyarakat disekitarnya.

Bentuk politik praktis Nahdlatul Ulama diantaranya adalah: Pertama, ulama diharapkan dapat menerapkan sikap integritas agamawi dalam memerangi berbagai ajaran yang menyimpang dari jalur agama. Kedua, menerapkan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar*. Ketiga, ulama harus menjadi *conflict breaker* dalam dunia politik. Keempat, ulama diharapkan dapat memperkuat ukhuwah dengan menjaga persatuan dan kesatuan umat agar tidak mudah goyah diombang-ambing oleh serangan politik pergerakan yang dinilai tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

Keikutsertaan Nahdlatul Ulama di kancah politik dimulai dengan diangkatnya beberapa ulama di kursi legislatif maupun eksekutif. Contohnya seperti K.H. Wahid Hasyim dan K.H Masykur yang lebih dulu menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Parlementer.

Menurut Keputusan Mu'tamar NU No. 06/ MNU-28/ 1989 tentang masalah umat memuat pandangan dan sikap NU terhadap politik, salah satu diantaranya adalah bahwa:

“Politik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan

mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan” (WR 2012).

Dari keputusan tersebut dapat difahami bahwa, Nahdlatul Ulama dalam memaknai politik adalah sebagai arena memperjuangkan tegaknya agama dan paham *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja), menyuarkan serta mengembangkan sikap demokrasi dalam pemerintahan, serta menghargai adanya pluralisme di dalam masyarakat. Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 M memberikan pengaruh berupa euforia reformasi yang turut mendorong para elite NU untuk mendirikan partai politik sebagai kendaraan dalam menyongsong pemilu pada tahun 1999. Akibatnya, 3 (tiga) partai sukses lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ummat (PNU).

NU lahir sebagai kelanjutan dari berbagai organisasi yang lebih dulu muncul. Setidaknya terdapat tiga alasan utama NU berdiri. Pertama, alasan lokal, yaitu sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Kedua, NU lahir sebagai upaya memberi wadah bagi umat Islam yang menganut paham keagamaan mazhab Syafi'i yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Alasan kedua ini menegaskan, bahwa NU lahir sebagai akibat perkembangan politik di kalangan umat Islam yang sangat sedikit memberi ruang artikulasi, bagi warga pesantren dan kalangan muslim tradisional pedesaan dalam urusan politik yang lebih luas. Ketiga, alasan internasional, yakni munculnya gerakan modernis di kancah internasional yang dipelopori oleh kelompok Pan-Islami.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, bertanggung jawab untuk membantu Muslim yang menderita karena konflik atau isu-isu global lainnya. Hal itu menandakan NU akan selalu terlibat dalam membantu Muslim di seluruh dunia yang sejalan dengan logika manusia normal dan asas dasar nilai-nilai keislaman. Kontribusi NU dapat dilihat dalam dua hal: mengunjungi daerah konflik dan menginisiasi advokasi kelembagaan dengan membentuk forum internasional yang disebut Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (ICIS).

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama nilai-nilai yang mencakup dalam dunia internasional itu sebelumnya sudah ada, hal tersebut bisa dilihat dalam dalam proses perjalanan dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yaitu KH. Wahab Chasbullah yang mana beliau tunjukkan dari adanya Panitia Hijaz. Panitia Hijaz dibentuk dengan tujuan agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Akan tetapi selain itu tujuan dari Hijaz yaitu untuk mempersiapkan delegasi ke Muktamar Islam di Mekkah, dan untuk menemui Raja Saud di Hijaz (Arab Saudi) dalam tujuan untuk melakukan diplomasi. Dengan ini maka semakin jelas bahwa sejak awal Nahdlatul Ulama telah berusaha untuk turut menanggapi beberapa permasalahan Internasional (Lezi, 2011).

Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari tau bagaimana *faith-based diplomacy* berperan dalam lingkup Nahdlatul Ulama yang berada di Sudan. Dalam proses mencari data tersebut penulis mengenal dengan salah satu tokoh yang mana beliau pernah menjabat sebagai Ketua PCINU Sudan pada periode 2020-2021, mulai dari situ peneliti akan melakukan tahap wawancara untuk mencari data dan menyesuaikan dengan konsep *faith-based diplomacy*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul dan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang peneliti ambil yaitu :

“Bagaimana Strategi *Faith Based Diplomacy* PCINU Sudan dalam menyebarkan Nilai-nilai Islam Nusantara 2020-2021 ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang sudah ada di Latar Belakang dan Rumusan Masalah maka Tujuan Penelitian Skripsi yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui peran PCINU Sudan dalam menyebarkan gagasan Islam Nusantara di Sudan sejak tahun 2020-2021

## **1.4 Cakupan penelitian**

Melihat banyaknya perkembangan dan cakupan masalah yang ada pada penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan untuk menguraikan apa masalah yang hadir dan apa masalah yang diselesaikan atas penelitian yang diangkat ini. Mengingat masih banyak dari masyarakat atau orang umum belum mengetahui bagaimana bentuk proses penyebaran luar negeri Nahdlatul Ulama, diplomasinya, dan perkembangannya. Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dibentuk diatas, maka cakupan penelitian yang diangkat oleh penulis disini berada hanya di wilayah negeri Sudan dan berada di Periode PCINU tahun 2020-2021.

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan waktu yaitu pada periode PCINU Sudan tahun 2020 hingga 2021. Penulis melakukan penelitian di wilayah Sudan dikarenakan di periode itu ada sumber Primer yang terjamin kredibilitasnya

yaitu beliau merupakan ketua PCINU Sudan pada masa periode itu. Mengambil penelitian di tahun periode PCINU 2020-2021 karena melihat kondisi Sudan saat itu tengah menghadapi ketidakstabilan politik selama periode tersebut. Pada tahun 2019, Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa selama hampir tiga dekade digulingkan setelah protes massa yang luas terhadap pemerintahannya.

Sebelum tahun 2020 pun PCINU Sudan belum banyak melaksanakan program-program besar yang lingkupnya luas atau bahkan lingkup Internasional. Karena pernah tercatat saat itu di tahun 2006 PCINU Sudan belum berhasil mengundang ketua Majma Fiqh Al Islami Sudan. Maka dari itu sejak periode 2020 ini PCINU Sudan mulai banyak melakukan kegiatannya yang dengan lingkup luas dan bahkan sampai lingkup Internasional. Urgensi PCINU di Sudan menjadi penting karena di Sudan saat itu sudah ada banyak ulama, akan tetapi mereka banyak yang belum memiliki wadah untuk berdakwah nya, sehingga PCINU hadir di Sudan membawa solusi serta menawarkan visi baru.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini pada akhirnya ditujukan supaya masyarakat umum atau pendidik bisa mengetahui lebih dalam tentang proses politik luar negeri Nahdlatul Ulama maupun penyebaran nilai Islam Nusantara yang mana hal itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka dalam berkehidupan, berorganisasi, dan bersosial.

Jika kita melihat kembali tentang asas politik yang terletak dalam tubuh NU disebutkan ada tiga, antara lain politik kenegaraan, kerakyatan, dan praktis. Dari ketiga jenis tersebut yang diutamakan adalah politik kenegaraan, karena jika dilihat sejarahnya NU sangat berperan dalam merumuskan prinsip dasar negara Indonesia,

contohnya seperti KH. Wahid Hasyim beliau menolak piagam Jakarta dicantumkan sebagai dasar negara (Muhtadi 2004).

Ancaman keamanan Internasional akan selalu muncul dan terus ada sepanjang dunia ini masih berjalan, konflik yang ada bukan hanya tentang politik tingkat tinggi, melainkan juga konflik keagamaan yang tidak jarang kita jumpai dalam media massa. Bentuk ancaman non-tradisional juga banyak terjadi pada masa saat ini, seperti isu virus menular, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, dan lain sebagainya yang juga mengancam perdamaian global. Adanya *Conflict Of Communal Identity* yang biasanya berbasis di bidang agama, ras, suku, identitas, dan hal lain yang sejenis pada saat ini justru itu menjadi masalah besar yang tidak jarang berujung pada konflik. Kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar menjadikan kita harus lebih mengerti terkait permasalahan serupa. Salah satu organisasi keagamaan yang turut berperan penting dalam kehidupan sosial politik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (Purwono 2013).

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menyebarkan islam nusantara dan mensosialisasikan nilai-nilainya sebagai bentuk sumber *soft power* Indonesia. Bentuk diplomasi yang dilakukan oleh kedua ormas ini melalui jalur dialog yang sering dilakukan oleh mereka kepada banyak negara-negara muslim atau non muslim dialog yang dilakukan bahkan tidak jarang ialah dialog antar agama (Rohman 2018).

Dalam salah satu penelitian tentang Resolusi Konflik Kelompok Separatis Muslim di Thailand Selatan (Strategi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sebagai Mediator Konflik antara Pemerintah Thailand dengan Kelompok Separatis Muslim di Thailand Selatan Tahun 2005-2017) didalamnya dijelaskan bagaimana strategi

dan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai mediator bagi Pemerintah Thailand dengan kelompok separatis di Thailand Selatan. Strategi yang digunakan yaitu dengan *Shuttle Diplomacy*, kemudian pendistribusian bantuan beasiswa bagi pemuda asal Thailand Selatan, dan pendirian Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) di salah satu wilayah di Thailand Selatan (Sari 2019).

Nahdlatul Ulama dalam melakukan penyebaran nilai islam nusantara kepada masyarakat internasional diperkasai oleh para kyai yang memiliki peran penting sebagai pewaris para nabi. Ide para kyai pun tak terlepas dari norma yang telah mereka yakini yaitu ide Islam Rahmatan Lil Alamiin. Organisasi islam yang ada tidak hanya mengajarkan islam moderat sebagai ajaran universal, tetapi juga menggerakkan ulama-ulama untuk semakin menempati ranah Internasional supaya mereka sebagai filter dari bentuk laju radikalisme yang semakin meluas (Purwono 2013).

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa sudah banyak literatur yang membahas terkait bagaimana kiprah Nahdlatul Ulama khususnya para kyai nya sejak zaman dahulu membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam ruang lingkup Internasional. Akan tetapi belum ada yang membahas bagaimana kiprah Nahdlatul Ulama dalam melakukan kepentingannya untuk berdialog dan berdiplomasi pada masa masa sekarang. Mengingat permasalahan yang muncul juga semakin kompleks, bukan hanya tentang politik tingkat tinggi melainkan sudah sampai tentang isu kejahatan transnasional, perang antar agama, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Maka dari itu sebagai peneliti ingin mencoba menganalisis bagaimana Nahdlatul Ulama muncul dan berkembang di Negeri Sudan dan nilai apa saja yang disebarkan oleh Nahdlatul Ulama di Sudan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam studi Hubungan Internasional, aktor yang ada dalam Hubungan Internasional sering kali didominasi oleh *state actor* atau negara. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya zaman membuat aktor-aktor pun juga makin bervariasi, sampai tokoh agama pun bisa menjadi aktor dalam Hubungan Internasional pada saat ini.

Pada penelitian kali ini dalam menganalisa penyebaran nilai Islam Nusantara yang dilakukan PCINU, peneliti menggunakan konsep *Faith-Based Diplomacy* melalui Nahdlatul Ulama. Kerangka pemikiran serta landasan teori menjadi penting disini karena digunakan sebagai pacuan dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Makna dari teori adalah kerangka berpikir yang dibentuk melalui rangkaian fenomena dan proposisi yang logis sehingga akhirnya bisa memberikan makna terhadap rangkaian fakta yang jumlahnya tidak beraturan. Maka dari itu, agar memudahkan penulis dalam meneliti, teori digunakan sebagai pengampu sehingga dapat mudah dipahami.

Menurut salah satu pakar diplomasi Hasyim Djalal beliau menyebutkan dalam bukunya yaitu :

“Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan jika mungkin mendukung pandangan kita itu, tanpa perlu menggunakan kekerasan” (Djalal 1990).

Dalam buku berjudul “*Faith Based Diplomacy: Trumping Realpolitik*” karya Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy* menjadi bentuk *track two diplomacy* (Johnston 2003).

Kerangka Pemikiran dari Penelitian ini menggunakan Teori konsep *Faith Based diplomacy*, yang mana untuk mewujudkan perdamaian dalam *Faith-Based diplomacy* ada beberapa bentuk penyelesaian, antara lain yaitu :

Yang pertama, dengan menawarkan bentuk visi baru untuk membentuk keadaan baru dan hubungan baru antara satu sama lain. Sejatinya agama apapun di dunia ini mengatur dan mengedepankan nilai-nilai kedamaian serta berisikan prinsip moral yang mengatur bagaimana manusia satu berhubungan dengan manusia lainnya. Penawaran visi baru ini menjadi penting karena untuk mengamalkan prinsip perdamaian melalui hubungan spiritual antar manusia.

Selanjutnya, membentuk hubungan untuk menjembatani antara yang nyata (persitiwa yang sedang terjadi) dan yang tidak nyata (entitas spiritual dan prinsip keagamaan) dalam berbagai bentuk kelompok sehingga mereka bisa menyalurkan aspirasinya serta mengkomunikasikan apa yang mereka mau secara efektif untuk mewujudkan perdamaian.

Yang terakhir, yaitu ada pemulihan konflik yang biasanya dilakukan melalui mediasi. Tujuan dari pemulihan konflik ini untuk mengakhiri permusuhan, memulihkan antara pihak yang berkonflik, dan menyelesaikan permasalahan yang mendasari konflik. Dalam *Faith-Based diplomacy* didalamnya memanfaatkan nilai agama untuk pengampunan serta pemaknaan terhadap penderitaan serta janji akan kesembuhan yang pasti (Johnston 2003).

Dampak positif yang dibawa oleh agama dapat digunakan sebagai elemen dalam strategi *preventive engagement* secara efektif yang melibatkan aktor-aktor non negara seperti Nahdlatul Ulama sebagai NGO dalam berurusan dengan agama. NGO khususnya mereka yang digerakkan oleh individu dari berbagai latar belakang agama serta mereka yang memiliki kepiawaian dalam berdiplomasi dan pemecahan masalah melalui agama sangat cocok untuk dikirim ke wilayah-wilayah bermasalah. Keberadaan NGO di tempat-tempat yang diperlukan ini menjadikan pihak lokal merasa bahwa ada orang asing yang mereka memahami kepekaan terhadap agama mereka, termasuk budaya yang juga mempengaruhi martabat dan harga diri mereka (Johnston 2003). Hal seperti ini termasuk kedalam salah satu karakteristik *Faith-based diplomacy*, yaitu beroperasi dan bergerak melalui otoritas spiritual sebagai upaya *peacemaking*. *Faith-based diplomacy* memakai dua cara untuk membangun legitimasi diantara pihak-pihak asing. Pertama, melalui hubungan mereka dengan lembaga keagamaan yang sudah terjamin kredibilitasnya, dan kedua, melalui kepercayaan yang dibangun dari tokoh agama yang mewakili, akan tetapi upaya *Faith-Based diplomacy* juga bisa kehilangan kredibilitasnya jika ternyata mereka gagal dalam menghargai perbedaan tradisi antar agama, atau bahkan sampai menyinggung pemeluk agama lain dengan menyamaratakan tradisi semua agama (Johnston 2003).

Kelompok religious atau tokoh-tokoh agama mereka berpandangan bahwa agama bisa menjadi salah satu sumber perdamaian di muka bumi. Maka dari itu disinilah peran penting para tokoh agama untuk bisa mendamaikan atas konflik yang terjadi melalui pesan-pesan keagamaan yang menenangkan. *Faith-Based diplomacy* yang penulis gunakan sebagai landasan konseptual menjadi hal penting

dalam menyebarkan kedamaian di seluruh penjuru negeri dan juga sebagai upaya pencegahan suatu konflik sehingga bisa terwujud penerimaan di segala aspek kehidupan (suku, agama, budaya, dan ras). Tidak jarang juga melalui *Faith-Based diplomacy* diadakan *Interfaith Dialogue* yang memberikan peran besar dalam perdamaian. Dalam Multi Track Diplomacy peran kelompok religious kadang kala menjadi hal yang turut diikutsertakan dalam memengaruhi kebijakan yang ada di suatu negara. Adanya dialog antar agama ini justru menjadi penting karena bisa memupuk dan menumbuhkan jiwa toleransi dan perdamaian yang ada di muka bumi (Johnston 2003).

Dalam penelitian ini teori yang relevan dan digunakan oleh penulis hanya di poin nomor satu, yaitu tentang menawarkan visi baru. Yang mana PCINU Sudan menawarkan bentuk visi baru yang mendorong bagi setiap pihak supaya bisa menciptakan hubungan dan keadaan yang baru antara satu sama lain, didalamnya pun termasuk juga nilai Islam Nusantara yang disebarkan dalam penyebarannya.

Selain teori diatas yang digunakan, penulis juga memiliki teori alternatif dari buku Philip Seib yang berjudul *Religion and Public Diplomacy* dalam bukunya di bab 6 ada salah satu poin teori yaitu, mengintegrasikan tentang faham beragama melalui program pertukaran. Pemerintah harus mengintegrasikan isu tentang faham beragama yang relevan dengan kondisi setempat ke dalam pertukaran pendidikan, budaya, program visitasi, seminar internasional, dan diskusi dialog warga. Pertukaran ini dapat mempertemukan para pemimpin agama, ekonom, ilmuwan politik, sarjana hukum, pengacara, hakim, pembela hak asasi manusia, jurnalis, pemimpin budaya, serta pejabat pemerintah dan keamanan (Seib 2013).

## 1.7 Argumen Sementara

Dalam teori *faith-based diplomacy* didalamnya memiliki karakteristik yang mengharuskan pemimpin maupun institusi agama bisa memiliki pengaruh kuat dalam proses *peacemaking* yang mana nilai itu tidak dimiliki oleh aktor diplomasi lain, dan itu harus menjelaskan bagaimana bentuk diplomasi ini bisa berbeda yang tentu memiliki keistimewaan yang digunakan oleh para aktor *faith-based diplomacy*.

Maka berdasarkan teori konsep *faith-based diplomacy*, PCINU Sudan harusnya bisa menawarkan visi baru yang mana hal itu nantinya bisa diterima di Sudan khususnya dan di seluruh dunia umumnya. Selain itu PCINU juga harus bisa menjadi pihak penengah bagi siapapun yang sedang berada dalam konflik, atau bisa juga menjadi pihak yang melakukan mediasi atas pihak-pihak yang berkonflik. Tentunya dengan memanfaatkan nilai-nilai keagamaan serta pengampunan yang nantinya masalah bisa diselesaikan melalui cara yang damai tanpa harus menyakiti atau sampai menumpahkan darah.

Strategi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan *Multitrack Diplomacy* banyak dilakukan melalui *Interfaith Dialogue* yang dilakukan oleh para kyai yang memiliki kapabilitas dalam bidang keilmuan. KH. Yahya C Staquf atau yang biasa dikenal dengan Gus Yahya menjadi tokoh penting dalam perubahan arah baru diplomasi Nahdlatul Ulama. Gus Yahya berulang kali menyampaikan saat ini PBNU harus terus berusaha ‘menghidupkan Gus Dur’, artinya yaitu dimaknai dengan membangkitkan kembali semangat perjuangan dan gagasan Gus Dur di berbagai level seperti konsolidasi warga Nahdliyyin, gerakan sosial, serta upaya dalam menguatkan perdamaian global.

Visi Gus Yahya yang sejalan dengan amanat dari Gus Dur yaitu membawa Nahdlatul Ulama memiliki dampak yang signifikan secara global, hal tersebut pun mendapat respon positif di level Internasional. Semenjak Januari 2022, beberapa Duta Besar banyak yang berkunjung ke PBNU untuk berdialog bersama Gus Yahya dan jajaran pengurusnya. Seperti Duta Besar dari Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Pakistan, Palestina, dan masih banyak yang lainnya.

Pada intinya mereka banyak berdatangan ke kantor PBNU karena mereka menaruh harapan tinggi kepada PBNU untuk terus berkontribusi di level global, khususnya dalam hal mencari alternatif solusi atas berbagai permasalahan Internasional.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian Kualitatif. Secara singkat makna atau arti dari pendekatan kualitatif yaitu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat empiris atau dengan kata lain dapat diamati dengan pancaindera sesuai dengan kenyataan. Penelitian atas data yang ada bukan dilakukan berdasarkan ukuran matematis yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti dan mendapat kesepakatan dari pengamat lain, melainkan berdasarkan ungkapan subjek penelitian berdasarkan apa yang dimaknai dan dikehendaki oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita terkait sebuah kejadian, fenomena, atau proses sosial yang terjadi.

### 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini subjek yang dituju oleh penulis yaitu fokus dalam penelusuran data pada instansi terkait yaitu PCINU Sudan dan sumber lainnya dengan mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk selanjutnya melakukan analisis data. Pentingnya fokus penelitian ini bermanfaat sebagai batasan terkait objek kajian yang diangkat, dan juga memberi kemudahan peneliti agar tidak terjebak pada banyaknya data yang ada. Sedangkan objek yang dituju oleh penulis yaitu Penerapan *Faith-Based Diplomacy* dan Penyebaran nilai Islam Nusantara melalui PCINU Sudan.

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan ini, penulis mendapatkan dari sumber sekunder dan primer, yaitu berasal dari jurnal-jurnal, berita, atau data-data yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan sumber primer yang penulis gunakan yaitu melalui metode wawancara dan riset observasi, metode yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif, artinya setelah data dikumpulkan, maka data akan diolah dan menjadi kesimpulan yang ringkas sehingga dapat menjawab rumusan masalah atas penelitian ini.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan disini dimulai dari pra riset sampai menemukan data yang sesuai, selanjutnya dilakukan analisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Prosedur ini menjadi penting untuk tinjauan peneliti dalam

melaksanakan risetnya. Berikut adalah penjelasan dari beberapa proses dalam proses penelitian, yaitu :

1. Pra Riset

Yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum riset dimulai seperti membaca bahan materi yang sesuai penelitian.

2. Pengambilan Data

Riset pengambilan data diambil berdasarkan data Primer dan Sekunder. Sumber Primer didapatkan melalui wawancara dengan ketua PCINU Sudan, kemudian laporan pemerintah secara langsung, atau Website resmi suatu kelembagaan. Sumber Sekunder diambil dari Media, khususnya media tulis, seperti Jurnal Artikel, surat kabar harian, pernyataan resmi Pemerintah, teks Akademis, dan lain sebagainya. Pemilihan sumber sekunder juga berdasarkan media yang memiliki kredibilitas media atau penerbit dan berhubungan dengan topik riset penelitian.

3. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data kemudian menuju tahap selanjutnya yaitu menganalisis data terkait dengan riset penelitian yang ditentukan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penelitian ini akan menjelaskan dalam 5 Bab bagian, penjelasan atas hal tersebut yaitu :

**BAB 1 : LATAR BELAKANG**

Didalamnya menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi, cakupan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

## BAB 2 : PEMBAHASAN

Didalam Bab 2 ini dijelaskan tentang pengantar dari fenomena yang terjadi, hal itupun dijelaskan melalui kerangka pemikiran dari para ahli maupun melalui sejarah, kronologi, atau dinamika isu.

## BAB 3 : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana pengaplikasian kerangka pemikiran dapat menyelesaikan permasalahan serta menimbulkan kedamaian rahmatan lil alaamiin melalui gerakan Nahdlatul Ulama yang tersebar di Luar Negeri khususnya Sudan.

## BAB 4 : PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bab ini menyimpulkan secara singkat bagaimana kerangka pemikiran atau teori yang ada bisa memecahkan suatu masalah.

**BAB 2**  
**RELEVANSI ISLAM NUSANTARA DI SUDAN DAN SEJARAH**  
**LAHIRNYA PCINU DI SUDAN**

**2.1. Gambaran Umum dan Kondisi Masyarakat di Sudan**

Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik internal antar etnis sejak bertahun-tahun lamanya. Sejak tahun 2003 konflik internal itu kebanyakan disebabkan oleh perlakuan diskriminatif pemerintah Sudan kepada warga dan suku Darfur, fenomena yang ada yaitu bentuk ketimpangan perhatian antara suku Fur dan suku Arab Nomaden, yang mana pemerintah lebih memperhatikan kondisi dari suku Arab Nomaden dibanding suku Fur tentang masalah sengketa sumber daya alam. Sehingga mulailah terbentuk golongan pemberontak yaitu Sudan Liberation Movement (SLM) dan Justice and Equality Movement (JEM) yang memunculkan konflik antara dua kelompok tadi dengan Pemerintah Sudan dan juga banyak memakan korban jiwa, baik yang tewas atau mengungsi (Toy 2018).

Pada tahun 2018-2019, Sudan menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks dan bervariasi. Beberapa permasalahan utama yang muncul selama periode tersebut adalah konflik bersenjata, masalah kemanusiaan, ketidakstabilan politik, dan ketegangan etnis. Salah satu permasalahan utama di Sudan pada saat itu adalah konflik bersenjata yang terjadi di beberapa wilayah negara. Konflik tersebut melibatkan pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak seperti Sudan *People's Liberation Movement-North* (SPLM-N) di wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Wilayah Biru. Konflik ini disebabkan oleh beragam faktor, termasuk

perbedaan etnis, politik, agama, dan sumber daya. Konflik bersenjata ini menyebabkan kekerasan, pengungsi, dan krisis kemanusiaan yang serius. Masalah kemanusiaan menjadi perhatian utama di Sudan pada tahun 2018-2019. Konflik bersenjata mengakibatkan jutaan orang menjadi pengungsi atau terinternalisasi di negara mereka sendiri. Banyak orang yang mengalami kelaparan, kurang akses ke air bersih, sanitasi yang buruk, dan layanan kesehatan yang terbatas. Organisasi kemanusiaan berusaha memberikan bantuan dan merespons kebutuhan yang mendesak, tetapi terbatasnya sumber daya dan akses yang sulit menyulitkan upaya tersebut (News 2019).

Selain itu, Sudan juga mengalami ketidakstabilan politik selama periode tersebut. Pada tahun 2018, Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa selama hampir tiga dekade digulingkan setelah protes massa yang luas terhadap pemerintahannya. Ini menyebabkan pergantian kekuasaan dan terjadinya transisi politik yang kompleks. Negosiasi dan perundingan berlangsung untuk mencapai kesepakatan politik yang stabil, tetapi perjalanan menuju stabilitas politik yang penuh masih berlangsung. Di samping itu, ketegangan etnis juga memainkan peran penting dalam permasalahan Sudan pada periode tersebut. Negara ini terdiri dari beragam kelompok etnis dengan kepentingan dan aspirasi yang berbeda. Ketegangan etnis dan konflik antara kelompok-kelompok ini memperumit proses perdamaian dan rekonsiliasi di Sudan (Nairobi 2020).

Latar belakang inflasi di Sudan pada tahun 2019 disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak efektif dari pemerintah dan konflik serta ketidakstabilan politik di negara tersebut. Kebijakan moneter yang tidak efektif menyebabkan pemerintah mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran dan kebutuhan negara, namun

tidak diiringi dengan peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan jumlah uang yang beredar di pasar semakin banyak sementara jumlah barang dan jasa yang tersedia terbatas. Akibatnya, harga barang dan jasa terus meningkat, dan daya beli masyarakat pun menurun. Konflik dan ketidakstabilan politik juga menjadi faktor penyebab inflasi di Sudan pada tahun 2019. Konflik di beberapa wilayah menyebabkan produksi pertanian dan industri terganggu, sehingga pasokan barang dan jasa semakin berkurang. Selain itu, ketidakpastian politik membuat investor enggan menanamkan modal di Sudan, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat (UNHCR 2021).

Upaya pemerintah untuk menangani inflasi di Sudan pada tahun 2019 belum terlalu efektif. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah menstabilkan kebijakan moneter dan fiskal, meningkatkan produksi dalam negeri, serta mengatasi konflik dan ketidakstabilan politik di negara tersebut. Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup efektif untuk menangani masalah inflasi yang sudah sangat tinggi di Sudan. Menurut penelitian yang dilakukan Mohamed Abdalla Elhaj Mustafa dan Abdelrahim A. Nour pada tahun 2020, inflasi di Sudan pada tahun 2019 mencapai angka yang sangat tinggi dan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Sudan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi inflasi dan mengembangkan perekonomian negara (Nour 2020).

Pada 2020-2021, negara Sudan masih berkutut dengan banyak isu-isu yang mereka hadapi antara lain seperti, ketidakstabilan politik, perang saudara, dan tantangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, utang luar negeri Sudan adalah 56 miliar USD, yang diperkirakan akan turun sebesar 50%

pada tahun 2022 setelah negara tersebut mencapai titik keputusannya di bawah *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) pada Juni 2021 (The World Bank 2023). Namun, kemajuan menuju titik penyelesaian HIPC terhenti karena pengambilalihan militer pada Oktober 2021. Pandemi COVID-19 juga memengaruhi ekonomi Sudan, dengan survei mengungkapkan kerugian dan kerapuhan ekonomi. Pada lampiran berita melalui BBC News Oktober 2021, militer Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengambil alih pemerintahan melalui kudeta militer, kudeta tersebut ditanggapi dengan protes, dan 62 warga sipil tewas dan lebih dari 140 orang terluka selama protes anti-kudeta. Para pemimpin militer dan politik Sudan perlu membangun kembali kepercayaan dengan publik domestik mereka sendiri, terutama dengan generasi muda, dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mendapatkan kembali dukungan finansial, ekonomi, dan politik dari komunitas internasional. Situasi di Sudan ditandai dengan ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan kerusuhan sipil. Utang luar negeri negara itu tinggi, dan pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada perekonomiannya. Kudeta militer pada Oktober 2021 menimbulkan protes dan kekerasan, yang mengakibatkan kematian banyak warga sipil. Para pemimpin militer dan politik Sudan perlu mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat mereka dan komunitas internasional (BBC News 2020).

Maka dari itu Nahdlatul Ulama melalui PCINU Sudan berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian yang berisi nilai Islam Nusantara. Sejatinya nilai Islam Nusantara adalah nilai yang mengalir dan bersambung dalam budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, Sudan merupakan negara muslim dengan banyak Ulama Sufi serta adat istiadat yang kental, sehingga jika konsep

Islam Nusantara diterapkan disana bisa menjadi bentuk visi baru untuk membangun perdamaian yang *rahmatan lil alaamiin*.

#### 2.1.1 Konsep Islam Nusantara

Pada dasarnya Islam tentu hanya satu yaitu Wahyu dan Firman Allah yang dibawa melalui manusia agung yaitu oleh Rasulullah. Firman-firman Allah ini memiliki bukti kebenaran yang absolut, serta didalamnya terkandung prinsip-prinsip umum yang bersifat universal. Bagi umat Islam, proses untuk mengimplementasikan firman suci ini memerlukan pemahaman sebagai bentuk upaya aktualisasi dan kontekstualisasi ajaran tersebut ke dalam realitas konkrit. Ketika masa Nabi Muhammad SAW umat Islam mempraktekkan nilai-nilai Islam ini dengan langsung mencontoh Rasulullah dengan ini menunjukkan bahwasannya Islam tidak bisa di persepsikan sebagai *model of reality*. Selanjutnya pada saat Islam lahir dan berkembang di bumi Nusantara, masih sangat sedikit dari masyarakat yang mengetahui tentang aktivitas umat Islam pada awal-awal di masa kerajaan. Maka disinilah peran Walisongo, dalam melaksanakan dakwah, mereka tidak hanya menjaga hak-hak dasar manusia, melainkan mereka juga menjunjung tinggi dan menghargai terhadap budaya maupun kesenian lokal, contohnya wayang yang sangat digemari oleh masyarakat dan tari topeng yang digunakan oleh wali sanga sebagai media untuk mengenalkan Islam. Sunan Kalijaga juga sangat toleran terhadap budaya lokal, dirinya yakin bahwa masyarakat akan menjauh apabila keyakinan mereka diserang. Sehingga mereka tidak bisa dipaksa dan kita harus melakukan pendekatan yang bertahap dengan mengikuti sembari mempengaruhi. Sunan Kalijaga sangat yakin jika Islam Sudah dipahami dan ada di keseharian mereka, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan pudar lalu menghilang.

Maka ajaran sunan Kalijaga terkesan sinkretis (penyesuaian antara aliran-aliran) dalam mengenalkan islam (Madjid 1998).

Konsep Islam Nusantara adalah konsep yang ditawarkan oleh Gus Dur yang berarti Islam adalah agama yang universal. Salah satu nilai yang dimasukkan Gus Dur dalam konsep Islam Nusantara adalah Islam pribumi, yang berarti ini adalah bentuk keterbukaan Islam untuk berdialog dan meleburkan nilai dalam budaya lokal Nusantara. Bentuk universalnya Islam menurut Gus Dur itu bisa dilihat melalui manifestasi ajaran yang di dalamnya termasuk Tauhid, Fiqih, dan Akhlaq. Islam Nusantara diusung juga oleh Nahdlatul Ulama sebagai konsep keislaman NU dan konsep dakwah yang dibawa oleh seluruh ulama dari NU yang tentunya merupakan estafet warisan ulama terdahulu dari dakwah ulama walisongo. Konsep inilah yang menjadi ciri khas dakwah NU dalam menyebarkan Islam yang ramah serta menyatu dengan budaya, tradisi, dan karakter lokal setempat (Haroen 2015).

Maka dari itu hadirnya Islam di tengah masyarakat Nusantara relatif tidak mengalami resistensi dan jauh dari penggunaan kekerasan. Masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas mereka tidak menganggap Islam sebagai sesuatu yang asing, yang datang dari luar. Islam dengan model semacam itu merupakan suatu karakteristik unik dari islam yang lahir dan berkembang di wilayah Nusantara. Islam tidak hanya hadir di kawasan ini, tapi Islam telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara. Maka dari itu, sudah sewajarnya jika Islam ini dikatakan sebagai model Islam Nusantara. Islam Nusantara semakin meluas ketika sudah dipegang dan disebarluaskan lebih lanjut oleh para pendiri Nahdlatul Ulama dan generasi penerusnya (Madjid 1998).

Nilai Islam yang hadir di Indonesia memancarkan wajah yang penuh perdamaian serta memiliki karakter yang unik sebagai rahmatan lil alamiin, sangat jauh dari pancaran ekstrimisme dan radikalisme. Nilai Islam Indonesiawi ini sudah dikagumi oleh banyak pihak di wilayah Timur, bahkan bukan hanya wilayah timur, Barat pun juga mengagumi pada pendekatan keagamaan Indonesia, mereka juga menjadikan Indonesia sebagai model alternatif dari bentuk kerukunan antara umat beragama di muka bumi. Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lain, maka umat muslim Indonesia mereka lebih condong menyukai pemahaman pluralis tentang agama daripada pandangan eksklusif dan fundamentalisme (Shihab 1998).

Sejarah panjang di Indonesia yang menunjukkan bagaimana membangun kerukunan antar agama, suku, dan budaya menjadi sejarah penting yang mana Indonesia nantinya bisa menjadi bentuk *role model* bagi dunia Islam maupun dunia secara umum. Jangka panjang jika harapan ini bisa terealisasi maka Islam Nusantara bisa menjadi bentuk antitesa atas citra Islam yang dahulu pernah tercoreng akibat ambisi beberapa kelompok yang menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Modal harapan tersebut bisa menjadi peluang bagi proses internalisasi atas gagasan Islam Nusantara ke dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sehingga nantinya citra Islam Nusantara yang membawa kedamaian bisa mendarah daging dan mengkristal di dalam tubuh Indonesia (Maarif 2009).

## **2.2. Sejarah dan Kondisi PCINU di Sudan**

Nahdlatul Ulama di Sudan tumbuh dan berkembang melalui hadirnya PCINU Sudan yang berdiri pada tanggal 1 Muharram 1420 H atau bertepatan

dengan 6 April 2000 M. Pendirian saat itu dilakukan di Masjid Agung Khartoum Sudan dengan keputusan dari Bapak Dr. H. Ahmad Sayuti Anshori Nasution, MA sebagai Rais Syuriah dan Bapak H. Muhammad Sangid, MA sebagai ketua Tanfidziyah PCINU Sudan periode 2000-2001 M. Selanjutnya pada 23 Januari 2002 M, Nahdlatul Ulama Khartoum Sudan diresmikan sebagai “PCINU SUDAN” di Wisma Duta Besar RI Khartoum Sudan untuk waktu yang tak terbatas melalui surat keputusan PBNU, yang menjabat menjadi Ketua Umum PBNU saat itu KH. Ahmad Hasyim Muzadi. Selanjutnya beberapa perwakilan pengurus PBNU melakukan kunjungan ke Sudan untuk peresmian berdirinya PCINU Sudan yang prosesi itu disaksikan langsung oleh Prof. Dr. KH. Said Agil Munawar, MA (Katib ‘Aam PBNU yang juga menjabat sebagai menteri agama pada saat itu). Kemudian pada 23 September 2007 M yang semula NU Khartoum Sudan akhirnya diresmikan menjadi PCINU Sudan serta mendapat pengakuan resmi dan terdaftar di bawah perlindungan dibawah Kementrian Irsyad dan Wakaf Sudan. Kepemimpinan PCINU Sudan saat itu sebagai Rais Syuriah nya Bapak H. Muhammad Amiruddin, MA dan sebagai ketua Tanfidziyahnya Bapak H. Mirwan Akhmad Taufiq, BA. Kebutuhan dari berdirinya PCINU Sudan tidak lepas dari kebutuhan untuk terus belajar khususnya dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan berdakwah, meskipun dalam prosesnya tidak akan mudah karena banyak tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Bahkan saat itu ada kelompok yang menginginkan agar NU tidak berdiri di Sudan, akan tetapi berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT PCINU Sudan bisa berdiri dan eksis hingga saat ini (NU Sudan 2020).

Pada masa awal mula berdirinya PCINU Sudan sangat jauh kondisinya jika dibandingkan dengan saat ini. Bahkan, pada masa-masa awal dahulu jumlah

mahasiswa Indonesia yang melakukan studi di negeri Sudan hanya 30-40 orang saja. Berbeda jika dibandingkan dengan saat ini yang mana mahasiswanya sudah mencapai lebih dari seribu mahasiswa aktif yang berjuang menuntut ilmu di Negeri Dua Nil ini. Begitu pula dengan organisasi kemahasiswaan Indonesia di masa tersebut, hanya ada organisasi PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Sudan dan tidak ada yang lain. Pada masa itu pun banyak juga mahasiswa Indonesia yang memiliki beragam ideologi berbeda. Sehingga dengan misi dan ideologi yang sama, Bapak Erwin Suhandi dengan rekan-rekannya menginisiasi untuk membentuk organisasi Nahdlatul Ulama di Sudan. Perjuangan mereka pun tidak hanya sampai situ, mereka juga memutuskan untuk melakukan studi banding ke PCINU Mesir dengan tujuan untuk membuat NU Khartoum Sudan menjadi lebih baik lagi kedepannya mengingat NU Khartoum Sudan baru berumur muda. Berkat perjuangan jasa-jasa mereka akhirnya budaya, pemikiran, serta ajaran dari Hasyim Asy'ari bisa berkembang lebih luas di negara yang diapit oleh Mesir dan Arab Saudi ini (NU Sudan 2020).

Tujuan mengapa didirikannya Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Sudan tak terlepas dari tujuan yang pernah ditetapkan dahulu pada Muktamar NU ke-30 pada tahun 1999 di PP Lirboyo Kediri, Jawa Timur yang tercantum dalam Bab IV pasal 5 & 6. Akan tetapi secara spesifik, PCINU Sudan didirikan sebagai bentuk ikhtiar dalam mensukseskan program “Go International” yang bertujuan untuk upgrading kualitas intelektual kader, menyiapkan calon ulama yang berwawasan luas, menjalin silaturahmi “Ukhuwwah Nahdliyah” (Ukhuwwah Islamiyyah, Wathoniyah, Basyariah) dengan banyak organisasi islam maupun organisasi Internasional yang ada, sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup

Nahdliyin (warga NU) secara khusus, dan masyarakat secara umum. Pada masa sekarang ini, secara garis besar tujuan PCINU Sudan adalah untuk merealisasikan visi “Mencetak kader Ulama yang Berkualitas Internasional” serta merealisasikan misi “Menjadikan NU Sebagai Organisasi yang Bermanfaat bagi Seluruh Alam (Rahmatan Lil Alamiin)”. Diatas dari visi dan misi tersebut ditunjang juga dengan Motto, “Memaksimalkan Khidmah dan Membumikan NU di Sudan dengan Semangat Intelektual Ulama”. Sudah banyak petunjuk yang membuktikan bahwa PCINU Sudan telah membumikan NU di negara Sudan ini dengan adanya Mustasyar PCINU Sudan dari kalangan warga Sudan yang jumlahnya saat itu tujuh orang di tahun 2017-2018, mereka pun dari berbagai bidang antara lain masyayikh tarekat, pengusaha, ulama, rektor, dokter, dan dekan yang ada di berbagai kampus di Sudan. Pada periode 2019-2020 ada penambahan Mustasyar baru PCINU Sudan, beliau adalah Syekh Awadl Al Karim Utsman Al Aqli, Musnid Sudan dan Ketua Bidang Keilmuan Majma Sufi. Beliau dan organisasi Majma Sufi mempunyai salah satu tujuan utama yaitu merawat dan menjaga benteng Aswaja di bumi Sudan yang mana hal tersebut sejalan dengan misi kehadiran NU di Indonesia (NU Sudan 2020).

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap lanskap sosial dan politik negara. Sikap NU terhadap politik luar negeri berkembang dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peristiwa sejarah, perubahan politik, dan dinamika internal organisasi itu sendiri. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, NU mengambil kebijakan non-blok dan mendukung prinsip-prinsip kemandirian dan kemandirian nasional. Sikap ini dipengaruhi oleh akar organisasi

yang nasionalis dan antikolonial, serta kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, NU mulai berperan lebih aktif dalam urusan internasional, khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu Islam. Itu menjalin hubungan dekat dengan berbagai kelompok dan organisasi Islam di seluruh dunia, termasuk Republik Islam Iran. NU juga terlibat dalam upaya perdamaian dalam konflik yang melibatkan umat Islam, seperti di Filipina dan Timur Tengah. NU juga terlibat dalam mempromosikan dialog antaragama dan kerjasama antar umat beragama, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Ini telah dilihat sebagai bagian dari upayanya untuk mempromosikan bentuk Islam yang lebih toleran dan damai, dan untuk melawan pengaruh kelompok yang lebih radikal dan ekstremis (Hosen 2017).

Beberapa tahun terakhir, NU semakin terlibat dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang dengan dunia Muslim. Pihaknya telah menyatakan dukungan terhadap posisi Indonesia sebagai mediator dan perantara perdamaian dalam konflik, seperti halnya konflik yang sedang berlangsung di Palestina. NU juga terlibat dalam mempromosikan peran Islam dalam mempromosikan pembangunan dan keadilan sosial di Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, pandangan kebijakan luar negeri NU dibentuk oleh sejumlah faktor, termasuk statusnya sebagai organisasi sosial dan keagamaan, akar sejarahnya dalam gerakan nasionalis dan anti-kolonial di negara-negara tersebut. awal abad ke-20, dan komitmennya untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan umat Islam secara keseluruhan (Zulkifli 2017)

Kiprah NU dalam urusan internasional ditandai dengan upaya mendorong dialog antaragama dan kerja sama antar umat beragama, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Sebagaimana dicatat dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam *Journal of Religion and Society*, NU telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan bentuk Islam yang lebih toleran dan damai, dan telah terlibat dalam berbagai inisiatif yang ditujukan untuk melawan pengaruh kelompok yang lebih radikal dan ekstremis (Hosen 2017).

Secara keseluruhan, pendekatan NU terhadap kebijakan luar negeri dipandu oleh komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam, serta kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia dan ummat Islam. Keterlibatannya dalam urusan internasional merupakan keinginan untuk mempromosikan dunia yang lebih damai, adil, toleran, dan untuk melawan pengaruh ideologi ekstremis dan intoleran.

### **BAB 3**

## **PERAN FAITH BASED DIPLOMACY DI NEGERI SUDAN MELALUI PCINU SUDAN**

Pada Bab ketiga ini penulis akan membahas bahwa PCINU Sudan benar-benar aktif sebagai aktor diplomasi serta hal-hal apa saja yang telah dicapai oleh PCINU Sudan dalam melakukan diplomasinya melalui jalur agama. Seperti dalam Teori yang di sebutkan dalam buku *Faith Based Diplomacy Trumping Real Politik* di Bab 2 yaitu, ada 3 bentuk penyelesaian untuk mewujudkan perdamaian dalam Faith Based Diplomacy, yaitu, menawarkan visi baru, menjembatani pihak yang berkonflik, dan mediasi atau pemulihan konflik (Monge 2003). Pada penelitian ini teori yang relevan dan digunakan oleh penulis hanya di poin pertama yaitu tentang menawarkan bentuk visi baru yang mendorong bagi setiap pihak supaya bisa menciptakan hubungan dan keadaan yang baru antara satu sama lain.

### **3.1. Visi Baru yang dibawa Nahdlatul Ulama sebagai Aktor Faith Based Diplomacy di Negeri Sudan**

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang juga memiliki pengaruh di tingkat internasional. Dalam upaya untuk menjadi aktor *Faith-Based Diplomacy*, NU telah menggunakan kehadiran organisasinya di berbagai negara sebagai platform untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat, perdamaian, dan kerjasama antarumat beragama. PCINU Sudan, yang merupakan cabang Nahdlatul Ulama di Sudan, juga berperan penting dalam upaya ini. PCINU Sudan aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai

komunitas agama di Sudan dan mengadvokasi toleransi, dialog antaragama, dan pemahaman saling menghormati di negara tersebut. Mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan *interfaith*, seperti dialog antaragama, pertemuan lintas keagamaan, dan proyek-proyek sosial bersama. Melalui PCINU Sudan, Nahdlatul Ulama telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya untuk mempromosikan perdamaian dan memecahkan konflik yang terjadi di Sudan. Mereka berupaya untuk menjembatani perbedaan dan memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam upaya mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Untuk mendukung banyak kegiatan antara agama maka diperlukan aktor agama yang berkompeten di bidang politik dan diplomasi. maka dari itu ada beberapa faktor yang perlu dipenuhi bagi seorang pemimpin agama atau institusi agar mereka dapat memiliki pengaruh di politik internasional, baik untuk menyebarkan nilai keislaman maupun untuk misi perdamaian. hal tersebut antara lain adalah : Reputasi politik yang kuat sehingga dapat membawa perubahan dengan nilai keagamaan yang telah disepakati bersama, pengaruh yang kuat dan diakui oleh masyarakat, kemampuan untuk mendamaikan dan memanusiaikan kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik, serta kemampuan untuk memobilisasi dukungan masyarakat, nasional, dan internasional untuk proses perdamaian (Johnston 2003).

*Faith Based Diplomacy* yang dibawa melalui PCINU Sudan menjadi penting karena dahulu awal mulanya posisi agama dalam tradisi hubungan Internasional masih dianggap kaku dan tidak fleksibel, dianggap seperti itu diantaranya karena karakter pemimpin, identitas negara, kepentingan material nasional, dan desakan dari kelompok Islam. Sedangkan peran agama idealisnya

berupa norma atau nilai-nilai kebaikan, akan tetapi hal itu maish sering terabaikan dalam hubungan internasional. Kemudian, letak posisi Nahdlatul Ulama sebagai rekanan pemerintah dalam menyusun kebijakan luar negeri nya tidak hanya sebatas sebagai kontributor melainkan NU juga terlibat dalam implementasi kebijakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya jika Islam Nusantara yang dibawa oleh NU disebut juga sebagai identitas nasional yang mana didalam nilai-nilainya menjunjung tinggi nilai keberagaman yang damai dan inklusif. Selain hal tersebut ada juga *norm specificity* yang tinggi, hal tersebut merupakan penjelasan atas norma tentang bagaimana membedakan perilaku atau sikap yang layak dan yang tidak layak. Perjalanan sejarah historis tentang kehadiran dan praktek Islam di Nusantara menjadi hal yang krusial terhadap kontribusi pembentukan tradisi beragama umat Islam di Indonesia pada masa saat ini. Dampaknya hal itu menjadi bagian integral identitas nasional. Hal seperti inilah yang menjadi asas dari konstruktivisme sosial yang menekankan norma untuk bisa diaplikasikan di masyarakat domestik (Andi 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis bersama Hiba, selaku Ketua PCINU Sudan periode 2020-2021 yaitu beliau menyatakan :

“Melalui hal itu maka Indonesia dan Sudan pun memiliki ikatan erat yang menyatukan kedua negara ini. Sama halnya seperti Indonesia dan Mesir yaitu yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah negara Mesir, begitu pun dengan Sudan yang mengakui kemerdekaannya pertama kali adalah negara Indonesia. Singkat cerita, karena NU bergerak di organisasi kemasyarakatan dan sosial maka bentuk Diplomasi yang dilakukan NU tidak melalui pemerintahan akan tetapi masuk ke Soft Diplomacy melalui jalur keagamaan. Salah satu tujuan PCINU disana ingin membantu Sudan untuk bisa mencontoh Indonesia salah satunya yaitu ketika Indonesia di tahun 98 terkena Krisis Moneter 2 tahun setelahnya perekonomian Indonesia sudah mulai membaik dan stabil, harapan tingginya dari PCINU seperti itu. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa melalui KBRI, peran KBRI hanya bisa menjadi fasilitator saja seperti

dalam bentuk pendanaan, transportasi, dll. Selanjutnya PCINU Sudan sejak tahun 2016 sudah mulai melakukan Soft Diplomacy nya melalui lembaga yang ada di Sudan yaitu *Majma' Alfiqh Al-Islami*, lembaga ini jika di Indonesia setara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak itu Nahdlatul Ulama berupaya untuk mempererat hubungan antara PCINU Sudan dengan *Majma' Alfiqh Al-Islami* meskipun upaya saat itu bisa dibilang belum berhasil” (Zain 2023).

Dari penjelasan pertama yang disampaikan oleh Hiba maka penulis menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama saat itu sudah mulai melakukan upayanya untuk memberikan bentuk visi baru dengan mulai menjalin relasi dengan *Majma' Alfiqh Al-Islami*, meskipun pada awalnya tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya Hiba meneruskan lagi penjelasannya yaitu :

“Bagaimana upaya PCINU Sudan mempererat hubungannya saat itu? Yaitu dengan mereka merancang acara Seminar Internasional membahas “*Muqorona Istibatul Hukum bayna Indonesia wa Sudan Nahdlatul ulama wa Majma Fiqh*” disana membahas tentang jika di NU kita punya bahsul masail, maka di sudan punya apa? Dan yang diundang saat itu ketua majma fiqh al islami yang ternyata beliau tidak bisa hadir karena salah satu alasannya yaitu politik. Akan tetapi setelah kudeta dilakukan, *Majma Fiqh* pun berubah dengan mayoritas yang memegang adalah mereka dari golongan sufi, dan NU disini juga harus sufi, tidak bisa jika dari Ikhwanul Muslimin. Salah satu alasan ketika 2016 ketua *Majma fiqh* tidak hadir di seminar internasional adalah karena beliau berlatar belakang dari Ikhwanul Muslimin. Kemudian sejak zaman kepengurusan baru PCINU di 2020 setelah terjadinya kudeta Omar Al Bashir dan setelah 2 tahun krisis yang dialami masyarakat Sudan, ada lembaga Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dimana mereka mulai mencoba lagi untuk mendekat ke *majma fiqh al islami* dan akhirnya bisa terjalin lagi, sampai lah akhirnya mereka membentuk suatu acara Seminar Internasional lagi dengan tema Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam ini sendiri adalah gagasan dari Gusdur yang berarti, Islam itu pada hakikatnya menyatu dengan bumi, jika di Indonesia islam itu menyatu dengan adat istiadat dan budaya. Dan hal itulah yang ingin PCINU sampaikan di masyarakat sudan, karena kasusnya pada ulama yang ada di Sudan mereka itu tidak punya wadah untuk bisa menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Berbeda dengan Indonesia yang mana dengan adanya jutaan masyarakat mereka terbagi dalam kelompok-kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama & Muhammadiyah yang mana jika ulama dari golongan satu berkata A maka jutaan pengikutnya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama tersebut” (Zain 2023)

Pada tahun 2020 PCINU Sudan berhasil melaksanakan Seminar Internasional untuk memberikan bentuk visi baru tentang *Islam Rahmatan Lil Aalamiin* melalui gagasan Gusdur yang bertemakan Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam pun sebenarnya dari kedua bangsa yaitu Indonesia dan Sudan memiliki ciri khas dalam praktiknya, dan hal itulah yang akan Nahdlatul Ulama akan coba kembangkan di Negeri Sudan ini. Dalam seminar tersebut Gus Yahya (KH Yahya Cholil Tsaquf) selaku Katib ‘Aam beliau menyampaikan bahwa Indonesia sudah lama menerapkan nilai-nilai dari Pribumisasi Islam yang digagas awal oleh KH Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal Gus Dur. Hal ini tampak dari kemajemukan Indonesia yang terdiri dari suku, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakatnya. Selanjutnya Gus Yahya juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Akan tetapi, dari berbagai negara negara islam lain, Indonesia lah yang di dalamnya terdapat identitas wilayah yang berupa budaya yang beragam (Setiawan 2021).

Selanjutnya, *Rais Majma Fiqh* Sudan menyebutkan bahwasannya Islam di Sudan sangatlah kuat, hal tersebut tampak dari bagaimana pandangan masyarakatnya mulai dari yang remaja hingga dewasa. Menurut beliau pun hal itu berdasarkan naluriah dan konsep keselamatan yang sudah ditanamkan di setiap pribadi mereka hingga bisa membentuk pola perilaku yang dominan dalam berkehidupan Islami. Setelah sesi dari dua pembicara kunci, dilanjut lagi kepada pemateri pertama yaitu Ribut Nur Huda yang mana dalam penyampainnya beliau mengenalkan tentang bagaimana *Mabadi Khairu Ummah* diterapkan di Indonesia pada masa saat ini. Beliau pun juga menjabarkan karena melihat semakin besarnya

dampak terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masa-masa saat ini, jika ada perubahan apapun konteksnya pasti akan membawa konsekuensi yang tidak kecil. Maka dari itu diperlukan penyesuaian serta pengembangan dari pergerakan sebagai bentuk langkah awal dalam membentuk masyarakat yang ideal (Setiawan 2021). Selanjutnya ada pemateri kedua yaitu Adil Hasan Hamzah, beliau menyampaikan bahwa antara Sudan dan Indonesia pastinya memiliki identitas masing-masing, meski dari itu hal tersebut bukanlah menjadi perbedaan yang fundamental, sebab esensi islam bagi Indonesia dan Sudan adalah sama, akan tetapi hanya berbeda dalam manifestasi praktik budaya lokalnya saja.

Respon masyarakat lokal dengan adanya seminar Internasional ini mendapat respon positif yang bisa dilihat dari jumlah hadirnya mereka dalam seminar Internasional ini, begitupula ketika setelah penjelasan dari keynote dan pemateri hadirin juga tampak antusias dan mengapresiasi acara yang digelar, hal itu terbukti dengan banyaknya antusias ketika sesi tanya jawab. Pada pertengahan acara pun juga ditampilkan video dokumenter yang menerangkan tentang apa itu pribumisasi islam serta bagaimana pribumisasi Islam menjadi bagian dari kontekstualisasi dari ajaran Islam yang menghargai tentang adat, budaya, dan kreativitas suatu bangsa (Setiawan 2021).

Nahdlatul Ulama melalui gagasan-gagasannya yang fenomenal sudah tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya di tingkat Internasional. Dari sekian banyaknya gagasan yang ditawarkan NU kepada dunia, gagasan besar yang ditawarkan NU adalah berkonsep Islam Nusantara dan Islam Moderat. Kedua nilai itu berisi wacana tentang *tawasuth*, *tasammuh*, *tawazzun*, *i'tidal*, dan *tasyawur*. Wacana itulah yang menjadi bekal utama NU dalam urusan berdiplomasi dan melakukan rekonsiliasi di

negara-negara Timur Tengah, dan negara asing lainnya. Dalam level global konsep-konsep yang diusung NU menjadi jalan besar yang membuktikan bahwa NU juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. NU berperan aktif dalam level Internasional dengan mengkampanyekan nilai *Islam rahmatan lil alaamiin*. Artian dari rahmat bagi seluruh alam ini bukan hanya ditujukan bagi umat muslim, melainkan bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Wujud usaha NU dalam wacana tersebut tidak hanya sebatas untuk memperkenalkan nilai Islam Nusantara, melainkan itu juga menjadi bentuk *soft-diplomacy* yang menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan juga mengamalkan prinsip diplomasi bangsa kita yang ‘bebas-aktif’.

### **3.2 Nilai Islam Nusantara dalam rangkaian Program Kerja PCINU Sudan**

PCINU Sudan dalam menghadirkan nilai Islam Nusantara dilakukan sepanjang tahun dengan banyak rangkaian program kerja, kali ini penulis akan coba meneliti dan menjabarkan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh PCINU Sudan di periode 2020-2021.

#### **3.2.1 Harlah NU ke-95**

Pada awal tahun 2021 tepatnya di bulan januari, PCINU Sudan menyelenggarakan acara yang saat itu dihadiri oleh para warga Nahdliyin di Sudan, dan juga dihadiri oleh masyarakat lokal juga. Tema yang diusung pada saat itu “Khidmah NU : Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan”. Selain itu juga masih ada rangkaian acara sebanyak 18 acara dalam rangka menyemarakkan Harlah NU saat itu (Sudan 2021).

### 3.2.2 Diskusi Pendidikan Aswaja bersama 15 Negara

Muslimat NU Sudan di tahun 2021 menyelenggarakan acara untuk mendiskusikan Pendidikan Aswaja dengan 15 Negara. Dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea saat itu, Almarhum Bapak Rossalis Rusman Adenan, kemudian jajaran Syuriah, dan Tanfidziyah PCINU Sudan. Delegasi dari 15 negara itu antara lain Thailand, Kamboja, Malaysia, Nigeria, Chad, Niger, Sudan, Palestina, Uganda, Burkina Faso, Komoro, Tanzania, Kenya, dan Gambia. Tema yang diusung saat itu adalah tema “*تربية السني في الدور الديني و الاجتماعي*” yang artinya “Pendidikan Sunni dalam Peran Keagamaan dan Sosial”. Acara itu dilaksanakan di Aula Indimi, International University of Africa (IUA) (Sudan 2021).

### 3.2.3 Seminar Internasional PCINU Sudan bersama *Majma Fiqh Al Islami Sudan*

Acara seminar ini menjadi awal mula kuatnya diplomasi antara PCINU Sudan dengan *Majma Fiqh Al Islami Sudan*. Dalam acara ini mengusung tema “Pribumisasi Islam, antara Indonesia dan Sudan”. Pembicara kunci saat itu mendatangkan secara virtual KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) beliau saat itu selaku Katib ‘Aam PBNU dan Prof. Dr. Abdurrahim Adam Muhammad sebagai *Ra’is Majma Fiqh Al Islami Sudan*. Kemudian dengan dua pemateri yaitu Ribut Nur Huda, S.Hum., M.Pdi., MA. (Mustasyar PCINU Sudan) dan Dr. Adil Hasan Hamzah (Ketua Umum *Majma Fiqh Al Islami Sudan*). Dalam prosesi Seminar Internasional ini juga dihadiri oleh banyak delegasi dari negara lain yaitu Turki, Etihad fathani, Etihad Malaysia, Majma Sufi, Jam’iyyah Asy’ari, Muhammadiyah. Diikuti juga oleh para generasi muda, mahasiswa dari Forpass, PPI Sudan, PPPI Sudan, dan beragam ormas lainnya (Sudan 2021).

### 3.2.4 Bakti Sosial di pelosok Negeri Sudan

NU Care – LAZISNU Sudan dan PCI Muslimat NU Sudan berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan Rohawil Sudan melaksanakan Bakti Sosial di Pelosok Negeri Sudan. Acara ini bertemakan “*Sharing, Caring, And Loving Each Other*” tujuan utama kegiatan ini adalah bukti bahwa kita masih saling peduli dan menjalin hubungan antar sesama. Pelaksanaan dibagi di dua wilayah yaitu di Desa Darussalam dan Bank Aqqari yang letaknya berada di pojok Kota Omdurman. Total pengumpulan donasi sebanyak 22 juta lebih dan disalurkan dalam bentuk pakaian layak dan sembako kepada kurang lebih 100 keluarga di dua wilayah tersebut (Sudan 2021).

Semenjak tahun 2020 – 2021 pengaruh PCINU Sudan dalam menyebarkan nilai-nilai positif menjadi suatu hal yang perlu di apresiasi dan ditiru, karena hakikatnya untuk berdakwah dan menyebarkan nilai Islam yang *rahmatan lil alaamiin* tentu tidak mudah. Nahdlatul Ulama melalui PCINU Sudan secara bertahap melakukan *soft-diplomacy* untuk menawarkan bentuk visi baru terhadap negeri Sudan melalui *Majma Fiqh Al Islami Sudan*, hingga puncaknya pada 2021 PCINU Sudan sukses melaksanakan Seminar Internasional dengan mengundang *Majma Fiqh Al Islami Sudan*.

Selain seminar Internasional tersebut, banyak juga bentuk kegiatan yang dilakukan PCINU Sudan dengan mengusung nilai-nilai Islam Nusantara, respon masyarakat lokal terhadap kegiatan PCINU Sudan mendapat sambutan hangat dan respon positif. Antara lain ketika pada acara Seminar Internasional yang mana di akhir acara tersebut banyak peserta yang melemparkan pujian serta diskusi tanya jawab singkat. Selanjutnya pada program Bakti Sosial yang dilaksanakan di dua

wilayah yang berada di pojok Kota Omdurman, masyarakat lokal merasa sangat terbantu dan mereka memberikan banyak ucapan terimakasih kepada penyelenggara acara.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Nahdlatul Ulama (NU) sejak awal lahirnya telah memiliki pengaruh signifikan terhadap lanskap sosial dan politik negara. Sikap NU terhadap politik luar negeri berkembang dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peristiwa sejarah, perubahan politik, dan dinamika internal organisasi itu sendiri. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, NU mulai berperan lebih aktif dalam urusan internasional, khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu Islam. Kondisi masyarakat Sudan sejak bertahun-tahun lamanya memang perlu perhatian lebih dari pihak Internasional, bahkan sampai saat inipun di Sudan masih terus ada konflik yang itu menumpahkan banyak nyawa masyarakatnya. Akan tetapi, di lain sisi nilai keislaman di Sudan juga sangat aktif, banyak juga ulama-ulama besar disana yang sangat dihormati oleh seluruh umat muslim di dunia.

PCINU hadir di Sudan sebagai jembatan untuk membawa nilai Islam Nusantara yang *rahmatan lil alaamiin* agar bisa menjadi solusi untuk perdamaian dan persatuan. Perjalanan Nahdlatul Ulama di Negri Sudan pun tidak mudah, banyak halangan, rintangan, maupun kesabaran yang harus mereka lewati, namun hal itu pastinya bisa berakhir sukses berkat perjuangan para ulama dan mahasiswa Indonesia di Sudan saat itu.

Nilai Islam Nusantara hadir di Sudan melalui banyak cara dan beragam bentuknya, PCINU Sudan mengemas sedemikian rupa supaya nilai-nilai rahmatan

lil aalamiin bisa sampai ke negeri Sudan, dengan adanya Seminar Internasional, dialog antar agama, hadroh atau *sholawatan* dan banyak kegiatan lain.

Dalam teori yang ditawarkan Faith Based Diplomacy, untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan negara tidak perlu lagi melalui jalan kekerasan, salah satunya yaitu melalui jalur kepercayaan atau agama. Douglas Johnston dalam bukunya *Faith-based Diplomacy Trumping Realpolitik* menjelaskan ada 3 poin utama untuk mencapai perdamaian, dari ketiga poin itu yang relevan dalam penelitian ini hanya ada di poin pertamanya yaitu menawarkan bentuk visi baru yang mendorong bagi setiap pihak supaya bisa menciptakan hubungan dan keadaan yang baru antara satu sama lain.

Hasil dari menawarkan visi baru tersebut tampak dalam program yang sudah dilaksanakan oleh PCINU Sudan yaitu Seminar Internasional dengan tema “Pribumisasi Islam”. Aktor-aktor yang hadir didalamnya banyak tokoh penting dari negara Sudan serta perwakilan dari negara lain juga. *Keynote* speaker pertama ada Gus Yahya, yang kedua ada *Rais Majma Fiqh Al Islami Sudan*. Yang hadir saat itupun juga banyak dari warga nahdliyyin dan masyarakat lokal yang mereka sangat antusias melihat tema yang dibawakan, antusiasme itu bisa terlihat dari banyaknya diskusi ketika sesi tanya jawab dan pujian yang disampaikan oleh peserta yang hadir. Meski di tahun sebelumnya ketika dahulu pemimpinnya sempat diundang untuk hadir di seminar Internasional serupa oleh PCINU Sudan akan tetapi beliau tidak bisa menghadiri acara tersebut. Akan tetapi perjuangan PCINU Sudan tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2021 akhirnya berhasil upaya PCINU Sudan untuk bisa menjalin relasi dengan *Majma Fiqh Al Islami Sudan* yang hal tersebut tidak lepas dari bantuan pemerintah Indonesia melalui KBRI di Khartoum Sudan.

## 4.2. Rekomendasi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Strategi *Faith-Based Diplomacy* PCINU Sudan dalam menyebarluaskan nilai Islam Nusantara (2020-2021)”. Penulis sendiri sangat menyadari masih ada banyak kekurangan dalam menganalisa topik yang diangkat, adanya keterbatasan sumber data dalam penelitian ini harus menjadi catatan penting untuk peneliti selanjutnya, harapannya untuk peneliti selanjutnya dapat lebih sempurna dalam menganalisa peran Nahdlatul ‘Ulama dalam penerapan *Faith-Based Diplomacy*. Maka dari itu, penelitian yang sudah dilaksanakan ini pastinya masih dapat dikembangkan lebih jauh dengan jangkauan yang lebih luas lagi sampai ke dalam aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Zulfikri, Ahmad, and Ashif Az Zafi. n.d. 2019. "“Tradisi Nahdlatul Ulama Dalam Prespektif Hukum Islam”." 8-12.
- WR, Jati. 2012. "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur NU." 96-103.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. "Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama ." *LP3ES*.
- Purwono, Andi. 2013. "“ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: Beberapa Prinsip Dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia.” ." *Jurnal Politik Profetik Vol 2. .*
- Rohman, Abid. 2018. "“ISLAM INDONESIA DAN DIPLOMASI SOFT POWER (Studi Kasus Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah).”." 7-20.
- Sari, Diny Nilam. 2019. "“RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK SEPARATIS MUSLIM DI THAILAND SELATAN (Strategi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sebagai Mediator Konflik Antara Pemerintah Thailand Dengan Kelompok Separatis Muslim Di Thailand Selatan Tahun 2005 - 2017).”." *Jurnal UIN Sunan Ampel*.
- Toy, Hardi Alunaza SD & Bastian Andhony. 2018. "Efektivitas Peacekeeping oleh United Nations-African Union Hybrid Operation Mission in Darfur Sudan (UNAMID) pada Konflik di Sudan Tahun 2007-2010." *Andalas Journal of International Studies* Vol. 7 No. 1.
- Nour, Mohamed Abdalla Elhaj Mustafa & Abdelrahim A. 2020. "Inflation in Sudan: Causes, Consequences and Remedies." *Journal of Economic and Financial Sciences* 13:1, 1-9, DOI: 10.4102/jef.v13i1.298.
- Hosen. 2017. "Islam dan Demokrasi di Indonesia: Toleransi Tanpa Liberalisme." *Jurnal Agama dan Masyarakat* 19, 1-17.
- Andi, Purwono. 2018. *"Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi"*. Yogyakarta: UGM.
- Zulkifli, M. 2017. "Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Urusan Asia Tenggara Saat Ini* 37-59.

Andi, Purwono. 2013. ""Organisasi Keagamaan dan keamanan internasional : Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 2-9.

### **Buku/ E-book**

Djalal, Hasyim. 1990. "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa." *Jakarta CSI*

Monge. 2003. *Faith-based Diplomacy Trumping Realpolitik. Edited by Douglas Johnston*. Oxford: Oxford University Press.

Thohir, Ajid. 2009. *Studi Kawasan Dunia Islam : Perspektif Etno, Linguistik, Dan Geopolitik*. Rajawali Pers.

NK, Ridwan. 2020. *Khittah NU Jilid I*. Yogyakarta: Diva Press

Johnston, Douglas. 2003. *Faith Based Diplomacy : Trumping Realpolitik*. London: Oxford University Press.

Seib, Philip. 2013. *Religion adn Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.

Haroen, Musthofa. 2015. *Meneguhkan Islam Nusantara*. Jakarta: PT. Khairu Jalisin Kitabun (KHALISTA).

### **Website**

The World Bank. 2023. *The World Bank in Sudan*. Juni 28. <https://www.worldbank.org/en/country/sudan>.

BBC News. 2020. *Sudan country profile*. April 7. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14094995>.

NU Sudan. 2020. *PCINU SUDAN*. April 6. <https://pcinusudan.com/2020/04/pcinu-sudan-sejarah-legalitas-dan-hal-yang-perlu-diketahui-generasi-milenial/>.

SUDAN, PCINU. 2020. *PCINU SUDAN*. April 6. Accessed Agustus 4, 2023. <https://pcinusudan.com/2020/04/pcinu-sudan-sejarah-legalitas-dan-hal-yang-perlu-diketahui-generasi-milenial/>.

News, BBC. 2019. *Sudan's Omar al-Bashir ousted by military*. April 11. <https://www.bbc.com/news/world-africa-47892742> .

Nairobi. 2020. *Sudan: Security Forces Kill Protesters in Eastern Sudan Prosecute Killings, Prioritize Security Sector Reforms*. December 21. Accessed

August 13, 2023. <https://www.hrw.org/news/2020/12/21/sudan-security-forces-kill-protesters-eastern-sudan>.

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. 2021. *Sudan Emergency*. <https://www.unhcr.org/emergencies/sudan-emergency>.

Kuncoro, Suwarsono. 2020. *NU dan Penyusunan Politik Luar Negeri Indonesia. Forum Asia Timur*. <https://www.eastasiaforum.org/2020/03/30/nu-and-the-making-of-indonesias-foreign-policy/>.

Setiawan, Kendi. 2021. *Pribumisasi Islam Dibahas di Sudan*. Juni 30. <https://www.nu.or.id/internasional/pribumisasi-islam-dibahas-di-sudan-B1yVC>.

Sudan, NU. 2021. *PCINU SUDAN*. 31 Desember. <https://pcinusudan.com/2021/12/pencapaian-dan-kilas-balik-pcinu-sudan-2021-serta-pencapaiannya/>.

## **Wawancara**

Zain, Hibatullah. 2023. "Sejarah PCINU di Sudan, dan Pemaparan Program Kerja PCINU Sudan." *Wawancara oleh Abdurrazzaq Dzaky*. Yogyakarta.

## LAMPIRAN

### **Hasil Wawancara Penulis dengan Hiba (Ketua PCINU Sudan 2020-2021)**

Kelemahan kedutaan besar dia tidak bisa merangkul ke ranah budaya masyarakat, Contoh adalah apa yang terjadi di Sudan mulai dari 2019 itu pernah terjadi di Indonesia di zaman 98 yaitu Krisis moneter. Gusdur adalah satu-satunya presiden yang berkunjung ke Sudan, dan ketika beliau berkunjung ke sudan salah satunya gusdur menawarkan Undang-Undang tentang Konsensus bernegara yang baik itu seperti apa, karna Indonesia dan Sudan pada dasarnya memiliki ikatan batin yang erat sejak kemerdekaan. 1955 ktt asia afrika di bandung, Sudan datang ke Indonesia dengan kondisi dimana sudan belum memproklamasikan kemerdekaannya, kedatangan sudan ke Indonesia pun saat itu mereka belum punya bendera sehingga oleh Indonesia saat itu sudan dibuatkan bendera berwarna putih dengan tulisan Sudan di tengahnya.

Melalui hal itu maka Indonesia dan Sudan pun memiliki ikatan erat yang menyatukan kedua negara ini. Sama halnya seperti Indonesia dan Mesir yaitu yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah negara Mesir, begitu pun dengan Sudan yang mengakui kemerdekaannya pertama kali adalah negara Indonesia. Singkat cerita, karena NU bergerak di organisasi kemasyarakatan dan sosial maka bentuk Diplomasi yang dilakukan NU tidak melalui pemerintahan akan tetapi masuk ke Soft Diplomacy melalui jalur keagamaan. Salah satu tujuan PCINU

disana ingin membantu Sudan untuk bisa mencontoh Indonesia salah satunya yaitu ketika Indonesia di tahun 98 terkena Krisis Moneter 2 tahun setelahnya perekonomian Indonesia sudah mulai membaik dan stabil, harapan tingginya dari PCINU seperti itu. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa melalui KBRI, peran KBRI hanya bisa menjadi fasilitator saja seperti dalam bentuk pendanaan, transportasi, dll. Selanjutnya PCINU Sudan sejak tahun 2016 sudah mulai melakukan Soft Diplomacy nya melalui lembaga yang ada di Sudan yaitu *Majma' Alfiqh Al-Islami*, lembaga ini jika di Indonesia setara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak itu Nahdlatul Ulama berupaya untuk mempererat hubungan antara PCINU Sudan dengan Majma Alfiqh Al-Islami meskipun upaya saat itu bisa dibilang belum berhasil.

Bagaimana upaya PCINU Sudan mempererat hubungannya saat itu? Yaitu dengan mereka merancang acara Seminar Internasional membahas "*Muqorohah Istinbatul Hukum bayna Indonesia wa Sudan Nahdlatul ulama wa Majma Fiqh*" membahas tentang jika di NU kita punya bahsul masail, maka di sudan punya apa? Dan yang diundang saat itu ketua majma fiqh al islami yang ternyata beliau tidak bisa hadir karena salah satu alasannya yaitu politik. Akan tetapi setelah kudeta dilakukan Majma Fiqh pun berubah dengan mayoritas yang memegang adalah mereka dari golongan sufi, dan NU disini juga harus sufi, tidak bisa jika dari Ikhwanul Muslimin. Salah satu alasan ketika 2016 ketua Majma fiqh tudak hadir di seminar internasional adalah karena beliau berlatar belakang dari Ikhwanul Muslimin. Kemudian sejak zaman kepengurusan baru PCINU di 2020 setelah terjadinya kudeta Omar Al Bashir dan setelah 2 tahun krisis yang dialami masyarakat Sudan.

Ada lembaga Lapedam (lembaga kajian..) dimana mereka mulai mencoba lagi untuk mendekat ke majma fiqh al islami dan akhirnya bisa terjalin lagi, sampai lah akhirnya mereka membentuk suatu acara Seminar Internasional lagi dengan tema Pribumisasi Islam. Pribumisasi islam ini sendiri adalah gagasan dari Gusdur yang berarti, Islam itu pada hakikatnya menyatu dengan bumi, jika di Indonesia islam itu menyatu dengan adat istiadat dan budaya. Dan hal itulah yang ingin PCINU sampaikan di masyarakat sudan, karena kasusnya pada ulama yang ada di Sudan mereka itu tidak punya wadah untuk bisa menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Berbeda dengan Indonesia yang mana dengan adanya jutaan masyarakat mereka terbagi dalam kelompok-kelompok keagamaan seperti NU & MU yang mana jika ulama dari golongan 1 berkata A maka jutaan pengikutnya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama tersebut.

Sedangkan di luar negeri, seperti di Sudan, ulama nya disana alim-alim akan tetapi mereka tidak punya wadah. Maka dari itu makna pribumisasi islam ada di poin itu. Itulah yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama, agar ulama disana bisa meleak akan politik, bukan berarti ulama harus anti politik, karena dari ulama dan politik inilah yang nantinya akan menyelamatkan negara, sehingga makna Pribumisasi Islam adalah dimana nilai-nilai Islam bisa menyatu dengan adat istiadat di negara setempat. Hal itulah yang merupakan agenda besar Nahdlatul Ulama saat itu.

Dilain sisi jika melihat agenda kecil lain yang berkaitan dengan soft diplomacy nya yaitu ada kegiatan Majelis Sholawat, dan di Periode PCINU Sudan 2020-2021 ketika itu pertama kalinya bisa mendatangkan peserta perwakilan kurang lebih dari 30

negara. Majelis Sholawat saat itu bertajuk “Sudan Bersholawat”. Melalui kegiatan Sholawatan ini Nahdlatul Ulama banyak dikenal lebih cepat di khalayak umum, dan dari situ mereka semua bisa saling mengenalkan budaya antar satu sama lain. Kemudian tahun selanjutnya mengadakan Sholawatan lagi akan tetapi tidak sampai mengundang ke 30 negara seperti sebelumnya melainkan hanya mengundang ke masyarakat sudan setempat, dan saat itu banyak dihadiri oleh masyarakat lokal Sudan.

Selain itu masih banyak juga acara/kegiatan yang dilakukan oleh PCINU Sudan antara lain seperti : Program Dauroh ke Pondok Pesantren di Sudan, Lazisnu yang filantropinya membantu. Dan baru baru ini juga mengundang ketua PBNU dari LBMNU di Indonesia Kyai Mahbub Maafi.